

**TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN  
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Alfafa Rizqiyah  
NIM. C52212097**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfafa Rizqiyah  
NIM : C52212097  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan  
Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Perspektif  
Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 17 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



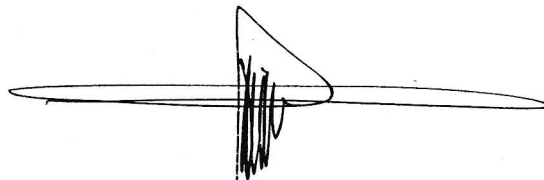
Alfafa Rizqiyah  
NIM. C52212097

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Alfafa Rizqiyah, NIM. C52212097** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Oktober 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical scribble in the center.

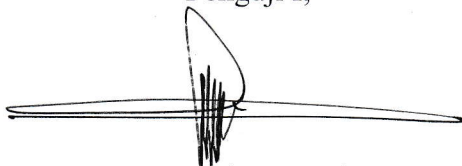
**Dr. Sanuri, M. Fil. I**  
**NIP. 197601212007101001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Alfafa Rizqiyah**, NIM. **C52212097** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

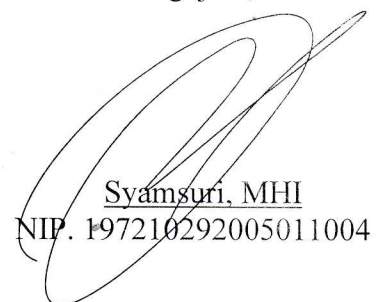
### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Sanuri, M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji II,



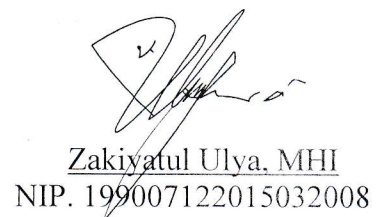
Syamsuri, MHI  
NIP. 197210292005011004

Penguji III,




M. Romdlon, SH., M.Hum  
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 November 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfafa Rizqiyah  
NIM : C52212097  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [rizqiyah91@gmail.com](mailto:rizqiyah91@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO**  
**KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2018

Penulis

(ALFAFA RIZQIYAH)



















masih dilakukan oleh masyarakat, dan dengan lamanya periode serta perubahan yang ada maka tak dapat dipungkiri pula bahwa bentuk-bentuk praktik hutang pun sangat beragam.

Terkadang, kita mendapati seseorang yang dengan sukarela meminjamkan hartanya tanpa ada jaminan dan dalam hukum Islam disebut dengan *qard*. Namun, ada pula pinjaman yang mengharuskan untuk memberikan jaminan dan dalam Islam praktik seperti ini disebut *rahn*. Hukum Islam memang memperbolehkan *murtahin* meminta *marhūn* pada *rāhin* sebagai jaminan, sehingga apabila *rāhin* itu tidak mampu melunasi sampai jatuh tempo maka *marhūn* tersebut dijual oleh *murtahin*.

Salah satu bentuk praktik hutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ialah pinjaman atau hutang uang dengan memberikan jaminan berupa sawah, hal ini lebih dikenal dengan *sende*. Transaksi *sende* ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang dalam jumlah banyak pada waktu yang mendesak. Dalam praktiknya, si A (pemilik sawah) meminta bantuan berupa pinjaman uang pada si B dengan menyertakan jaminan berupa sawah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, si A menawarkan sawahnya dari satu rumah ke rumah yang lain dimana seseorang (penerima *sende*) ialah orang yang dianggap mampu.

Selanjutnya ia meminta diberikan pinjaman berupa sejumlah uang dengan jaminan sawahnya serta beberapa syarat yang diajukan oleh penerima *sende*. Adapun waktu pengembalian uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Akan tetapi, disinilah terdapat kejanggalan dimana































## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuraikan isi pembahasan dalam beberapa bab. Dan masing-masing bab diuraikan sesuai dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yakni “Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Islam”. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, yakni pembahasan landasan teori mengenai konsep *rahn* yang memuat tentang definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan *marhūn*, berakhirnya akad *rahn*, serta konsep ‘*urf*’ yang memuat definisi, dasar hukum, macam-macam, syarat, kehujjahan, kedudukan serta pembenturan ‘*urf*’.

Bab ketiga, yakni pembahasan mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan tradisi *sende*. Bab ini mendeskripsikan gambaran lokasi penelitian secara umum, sejarah tradisi *sende*, proses pelaksanaan tradisi *sende*, hak dan kewajiban para pihak serta dampak yang ditimbulkan dari tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Bab keempat, yakni pembahasan mengenai analisis ‘*urf*’ terhadap praktik tradisi *sende* serta analisis ‘*urf*’ terhadap praktik tradisi *sende*.















































































penyebabnya dikarenakan mayoritas penduduk Desa Gedangan bekerja di bidang pertanian. Lain halnya, jika seseorang itu mempunyai usaha lain.

## 2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Sende*

Proses awal mengenai pinjaman atau hutang uang dengan memberikan jaminan berupa sawah yang lebih dikenal dengan istilah *sende* ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang dalam jumlah besar pada waktu yang mendesak. Dalam praktiknya, si A (pemilik sawah) meminta bantuan berupa pinjaman uang pada si B (penerima *sende* atau pemberi pinjaman) dengan menyertakan jaminan berupa sawah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, si A mencari informasi kepada sanak saudara maupun tetangganya mengenai seseorang yang biasanya dapat memberikan bantuan uang dengan jumlah besar.

Setelah mendapat informasi, si A ini menawarkan sawahnya kepada si B dari satu rumah ke rumah yang lain dimana si B ialah penerima *sende*. Dan jika telah mendapatkan seseorang yang menerima tawarannya, maka ia meminta diberikan pinjaman berupa sejumlah uang dengan jaminan sawahnya dengan beberapa syarat yang diajukan oleh penerima *sende*. Dalam hal ini, pemilik sawah tidak menyertakan surat kepemilikan tanah akan tetapi tanah tersebut dapat dipergunakan oleh penerima *sende* sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian *sende*.













Dan hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat Desa Gedangan terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan.

Tujuan pemilik sawah dalam melakukan tradisi *sende* ini tak lain untuk memenuhi kebutuhannya, terlepas itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hajat besar, membeli alat transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pemberi pinjaman, tujuannya ialah untuk membantu sesama dan tak luput pula untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan tanah sawah gadai tersebut. Karena dalam praktik ini, pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah sawah yang ia kerjakan tanpa adanya bagi hasil dengan pemilik sawah.

Praktik *sende* yang dilakukan oleh masyarakat desa Gedangan ini ialah peminjaman sejumlah uang disertai dengan penyerahan tanah sawah oleh pemilik sawah kepada pemberi pinjaman. Dalam pelaksanaannya, *sende* ini tidak menyertakan sertifikat kepemilikan. Akan tetapi hanya mengandalkan surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada tradisi ini juga dapat kita temukan dua hal yang bertentangan dengan aturan syara', yakni pelarangan dalam pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dan pemanfaatan tanah sawah *sende* oleh pemberi pinjaman. Dimana hasil dari pemanfaatan tanah sawah *sende* tersebut mutlak dimiliki oleh pemberi pinjaman tanpa adanya bagi hasil dengan pemilik sawah. Dan dalam hal pemanfaatan tanah sawah *sende* telah disebutkan dalam akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, disana tidak terdapat poin yang menjelaskan tentang status kepemilikan hasil panen.

Selanjutnya yakni perihal pelarangan penyegeraan pelunasan hutang. Alasan terjadinya hal ini tidak lain karena penerima *sende* tidak ingin rugi atas tanah *sende* yang digarap, dimana jika pemilik sawah melunasi maka sudah sewajarnya tanah sawah tersebut kembali pada pemiliknya. Akan tetapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena tujuan pelarangan tersebut hanya untuk mengambil keuntungan dari penggarapan tanah *sende* tersebut. Dan hal tersebut (pelarangan pelunasan hutang) tetap berkelanjutan meskipun pemilik sawah memberikan tenggang waktu dengan tetap membiarkan tanah sawah tersebut tetap dalam penguasaan penerima *sende* sampai jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas tak dapat dipungkiri lagi bahwa tradisi ini juga memberatkan salah satu pihak dimana pemilik sawah tidak dapat melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Sedangkan penerima *sende* dapat memanfaatkan tanah *sende* serta memiliki hasil panen secara keseluruhan tanpa adanya bagi hasil, dimana tidak ada kemungkinan rugi atasnya dalam transaksi ini. Dan alangkah baiknya jika kita kembali pada tujuan awal adanya *sende* ini yakni untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**

Jika dilihat dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tradisi *sende* yang dilakukan masyarakat desa Gedangan ini termasuk dalam akad *rahn*, yaitu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan dapat melunasi hutangnya dan menerima kembali barangnya (jaminan).





1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, dalam pelaksanaan *sende* ini dinyatakan sah karena pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal).
2. Syarat *ṣīghat* (lafadz ijab qabul), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Dalam hal ini ditemukan adanya poin yang mensyaratkan bahwa *murtahin* dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut. Oleh karena itu syarat dalam akad *sende* ini dinyatakan tidak sah.
3. Syarat *marhūn bih*, yakni hak yang wajib dikembalikan pada *murtahin*, *marhūn bih* itu boleh dilunasi oleh *marhūn* itu serta *marhūn bih* itu jelas atau tetap dan tertentu. Dalam hal ini, hutang yang ada pada praktik *sende* tersebut jelas tetap dan tertentu nominalnya sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian.
4. Syarat *marhūn*, yakni boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih*, *marhūn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal), *marhūn* itu jelas dan tertentu, milik sah *rāhin*, tidak terkait dengan hak orang lain, *marhūn* itu merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran dalam beberapa tempat serta *marhūn* itu dapat diserahkan. Dalam hal ini sudah tentu praktik *sende* memenuhi syarat *marhūn* karena sudah jelas bahwa jaminan yang diberikan berupa sawah milik sendiri dan dapat dimanfaatkan serta bernilai jual.

Ditinjau dari syarat *rahn*, transaksi *sende* yang dilakukan di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang terdapat syarat yang tidak terpenuhi yakni dalam syarat *ṣiḡhat*, dimana dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Hal ini menyebabkan akad dalam transaksi *sende* tersebut tidak sah.

Islam merupakan agama yang didalamnya segala sesuatunya diatur sedemikian detail, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Akan tetapi ada pula beberapa problem yang tidak tersirat secara gamblang dalam *naṣṣ* (al-Qur'an atau hadits), maka kita dapat temukan dalam berbagai metode istinbath hukum lainnya yang mana telah disepakati oleh jumhur ulama. Dari berbagai metode istinbath hukum, terdapat beberapa yang sudah disepakati oleh jumhur ulama serta ada pula yang masih diperselisihkan. Salah satu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan ialah '*urf*'. Terlepas dari itu, '*urf*' tetap digunakan oleh para ahli fuqaha' terutama di kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki.

Jumhur ulama telah sepakat jika '*urf*' dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Begitu pula tradisi yang berlaku di masyarakat, para ulama juga mengakuinya sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' sendiri ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan syara'. Jadi, '*urf*' yang dapat diterima sebagai























Maksud dari matan hadits di atas ialah bahwa seseorang yang paling baik dalam membayar hutang ialah ia yang tidak menunda-nunda dalam membayar hutang, melainkan menyegerakan dalam melunasi hutang. Jadi, tidak diperbolehkan bagi siapapun melarang seseorang yang akan melunasi hutangnya. Begitu pula dalam tradisi *sende* ini, *murtahin* tidak berhak melarang *rāhin* ketika melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan alasan yang telah dijelaskan di atas terlebih pelarangan tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan atas tanah sawah yang digarapnya. Dan hal ini sama saja ia menentang dalil syara’.

Berdasarkan penjelasan syarat-syarat ‘*urf*’ di atas, dapat kita ketahui bahwa tradisi *sende* tidak memenuhi keempat syarat di atas. Karena hanya tiga syarat saja yang terpenuhi, sedangkan satu syarat yang terakhir tidak terpenuhi yakni ‘*urf*’ itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣṣ* itu tidak bisa diterapkan. Pada syarat terakhir ini, sudah jelas bahwa tradisi *sende* ini menentang aturan syara’ dimana *murtahin* hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhūn* sebatas biaya pemeliharaan saja. Dan juga menentang dalam hal menyegerakan pelunasan hutang.

Dan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang termasuk dalam ‘*urf fāsid*’ karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, tradisi *sende* ini tidak memenuhi syarat-syarat ‘*urf*’ yang dapat dijadikan landasan hukum dimana ‘*urf*’ itu tidak bertentangan













